



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DJPK

JULI 2023





Ringkasan Publikasi dan Layanan Informasi



20 PUBLIKASI WEBSITE



1.707 TIKET KONSULTASI



41 PUBLIKASI KONTEN
MEDIA SOSIAL*



5 VIDEO CONFERENCE



5 WHATSAPP BLAST



24 KONSULTASI TATAP MUKA



9 LAYANAN PPID



9 WEBINAR/FGD

*rata-rata publikasi media sosial



Media Layanan Informasi DJPK

Telepon



Dering DJPK

150420

WhatsApp



0811-150420-7

Live Chat



contact-
djpk.kemenkeu.go.id

**Video
Conference**



DJPK Kemenkeu

Media Sosial



 @ditjenpk  @DitjenPK

 Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan

 DitjenPK Kemenkeu RI

Email



callcenter.djpk@kemenkeu.go.id
lapor.djpk@kemenkeu.go.id



Rincian Publikasi Website DJPK

1 Juli 2023	Statistik Akses Layanan Informasi DJPK 2021
1 Juli 2023	Statistik Akses Layanan Informasi DJPK 2022
1 Juli 2023	KMK nomor 83/KM.1/2021 tentang Daftar Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
1 Juli 2023	KMK nomor 84/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan
1 Juli 2023	Peraturan Menteri Keuangan nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan
1 Juli 2023	Peraturan Menteri Keuangan nomor 175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan
1 Juli 2023	Peraturan Menteri Keuangan nomor 238/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan
1 Juli 2023	Peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.01/2017 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial melalui Assessment Center di lingkungan Kementerian Keuangan
1 Juli 2023	KMK nomor 325/KMK.01/2022 tentang Sistem Penghargaan di Lingkungan Kementerian Keuangan
1 Juli 2023	Peraturan Menteri Keuangan nomor 221/PMK.01/2021 tentang Hari dan Jam Kerja serta Penegakan Disiplin Berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan



Rincian Publikasi Website DJPK (2)

- 1 Juli 2023 Peraturan Menteri Keuangan nomor 224/PMK.01/2020 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Kementerian Keuangan
- 1 Juli 2023 Peraturan Menteri Keuangan nomor 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
- 1 Juli 2023 Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
- 11 Juli 2023 Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 13 Juli 2023 Profil Pejabat DJPK Setelah Reorganisasi
- 17 Juli 2023 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023
- 21 Juli 2023 S-50/MK.7/2023 perihal Perpanjangan Batas Waktu Penginputan DAK Fisik dalam Aplikasi KRISNA
- 24 Juli 2023 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/KM.7/2023 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik TA 2023
- 20 Juli 2023 Flyer Website Tolak Gratifikasi
- 27 Juli 2023 KMK Nomor 271 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota



Rincian Publikasi Webinar DJPK

4 Juli 2023	Workshop Pemberdayaan Desa dan BUMDes - Univ. Lampung
6 Juli 2023	Diseminasi PP Ketentuan Umum PDRD
12 Juli 2023	Launching Buku Pedoman Umum PDRD
13 Juli 2023	Pelantikan dan Reorganisasi DJPK
14 Juli 2023	Workshop Pemberdayaan Desa dan BUMDes - Univ. Sriwijaya
20 Juli 2023	Workshop Pemberdayaan Desa dan BUMDes - Univ. Hasanuddin
25 Juli 2023	Sosialisasi Program Employee Advcacy
25 Juli 2023	Workshop Pemberdayaan Desa dan BUMDes - Univ. Soedirman
31 Juli 2023	Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah Periode I Tahun 2023



Rincian Layanan Whatsapp Blast

17 Juli 2023	Survey Kepuasan Pengguna Layanan 2023
18 Juli 2023	Testing S-75/PK/2023 KEM PPKF
25 Juli 2023	S-75/PK/2023 Penyampaian KEM PPKF TA 2024 sebagai Dasar Penyusunan KUA PPAS dan APBD TA 2024
25 Juli 2023	KMK 16 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Batas Waktu DAK Fisik Tahap I
25 Juli 2023	[Ralat] KMK 16 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Batas Waktu DAK Fisik Tahap I

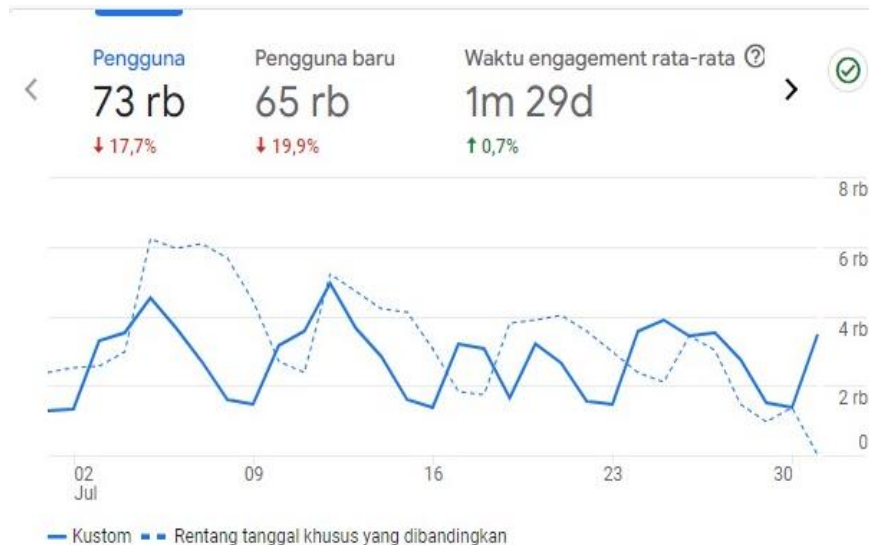


Kunjungan Website DJPK

Jumlah pengunjung Website DJPK selama bulan Juli sekitar 73.000, **menurun sekitar 18%** dibandingkan **bulan Juni 2023 (88.792)**.

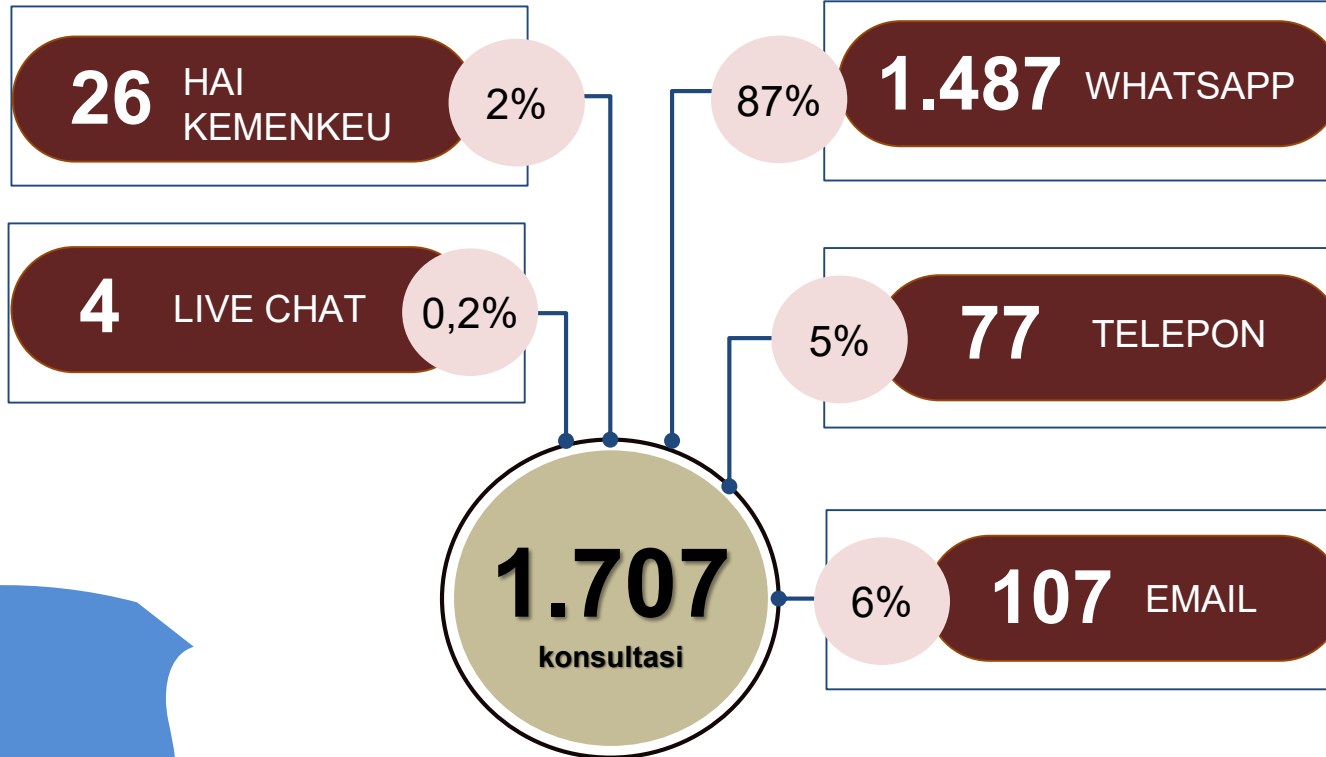
Halaman yang paling banyak diakses adalah tentang **Mandatory Spending, Portal Data APBD, Jenis-jenis Dana Perimbangan, Sumber-sumber Pendapatan Daerah dan UU Nomor 22 1999 tentang Pemerintah Daerah**.

Pada Bulan Juli 2023 terdapat perubahan tampilan pada Google Analytics sehingga tidak dapat melihat pengunjung website DJPK secara rill

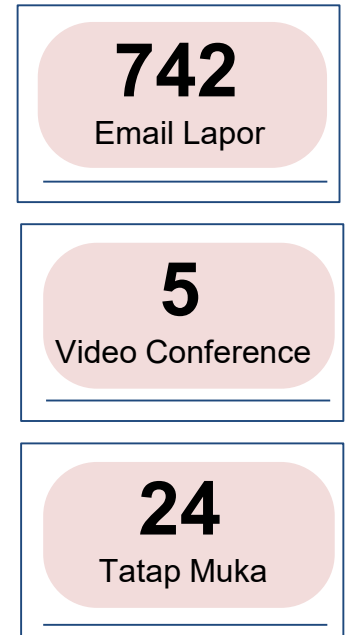




Tiket Konsultasi (Total 2478 Layanan)

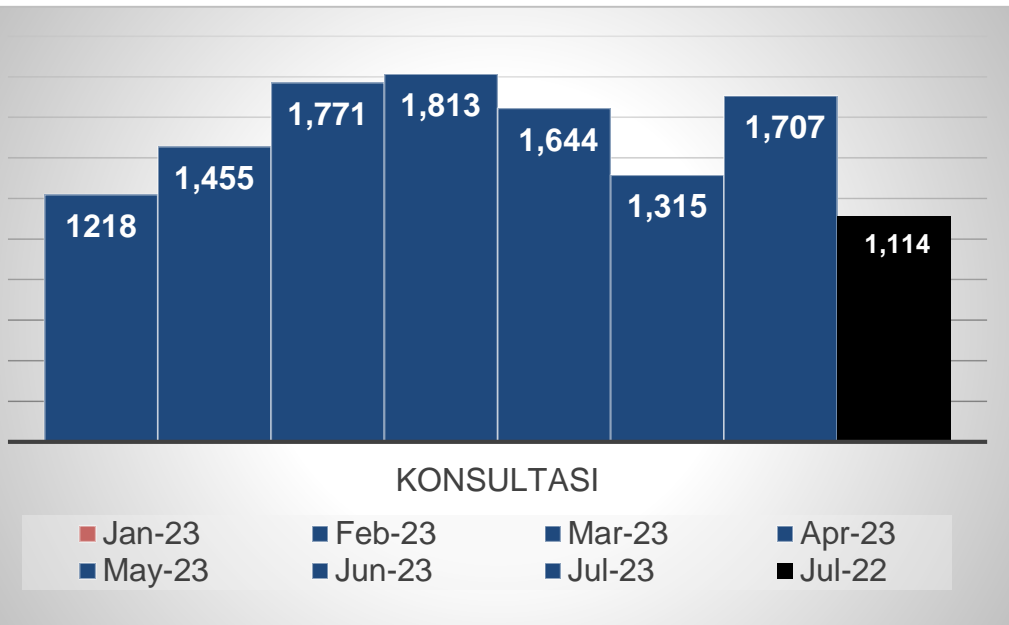


Layanan Lainnya:





Perkembangan Jumlah Konsultasi



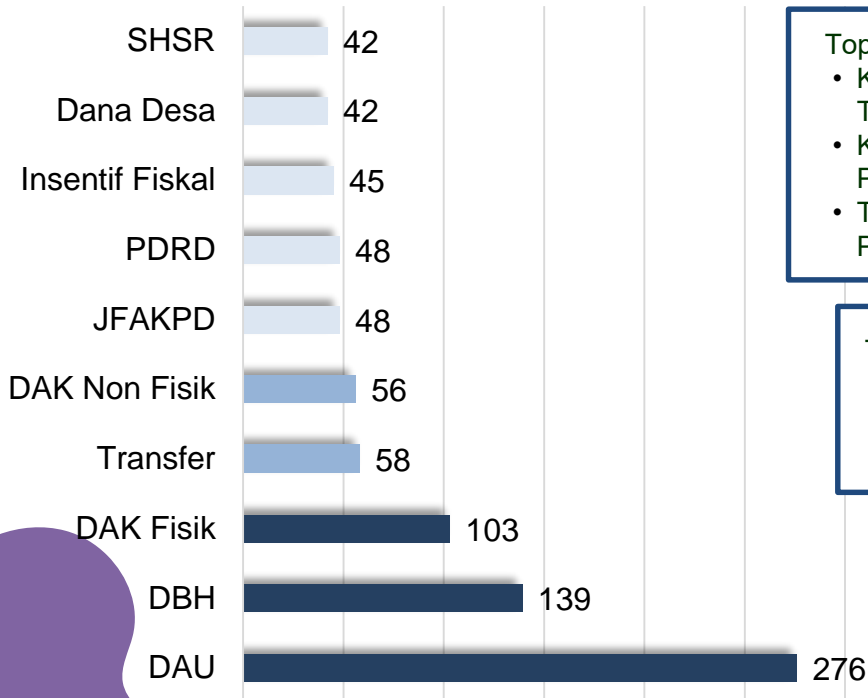
Jumlah konsultasi di bulan Juli 2023 **naik 29,80%** dibandingkan bulan Juni 2023 (1.315 konsultasi).

Jika dibandingkan dengan jumlah konsultasi di **bulan Juli 2022** (1.114 konsultasi), jumlah konsultasi **menurun 34,73%**.

Selama Januari s.d. Juli 2023, jumlah konsultasi yang dilayani Contact Center Dering DJPK adalah sebanyak **10.923 konsultasi** melalui berbagai media (WhatsApp, Telepon, Email, Hai Kemenkeu, dan Live Chat).



Topik Konsultasi Teknis



Topik **Dana Alokasi Umum (DAU)** terkait:

- Konfirmasi penyampaian syarat salur dan perkiraan salur DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Tahap II
- Konfirmasi penyaluran dan penundaan DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya bulan Juli 2023
- Tata cara penyampaian Laporan DAU yang Ditentukan Penggunaannya

Topik **Dana Bagi Hasil (DBH)** terkait:

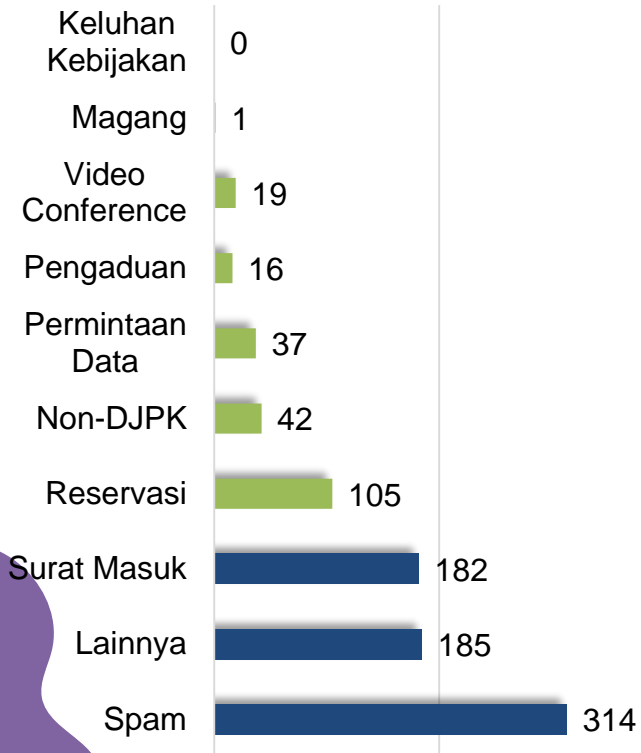
- Ketentuan pencatatan Saldo TDF dan Remunerasi dalam LKPD
- Rincian TDF dan mekanisme penarikan TDF
- Informasi Penyaluran DBH

Topik **DAK Fisik** terkait:

- Informasi perpanjangan batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I



Topik Konsultasi Lainnya



Spam

Mencakup tiket yang tidak perlu ditanggapi seperti balasan atas WhatsApp Blast, pesan spam, dsb.

Lainnya

Mencakup pertanyaan lainnya terkait dengan DJPK tetapi tidak masuk dalam kategori topik yang telah ada.

Surat Masuk

Mencakup penyampaian surat dan konfirmasi proses surat masuk.



Pengaduan dan Keluhan

Pengaduan

1

Undangan palsu kegiatan *Capacity Building Start Your Writing dan JF AKPD* yang mengatasnamakan DJPK (diterima oleh Kab. Lampung Tengah, Kota Mataram, Kab. Deiyai, Kab. Kudus)

2

Adanya pengaduan dari Masyarakat terkait penyalahgunaan penggunaan mobil operasional yang didanai dari DBH CHT untuk penggunaan operasional kantor.

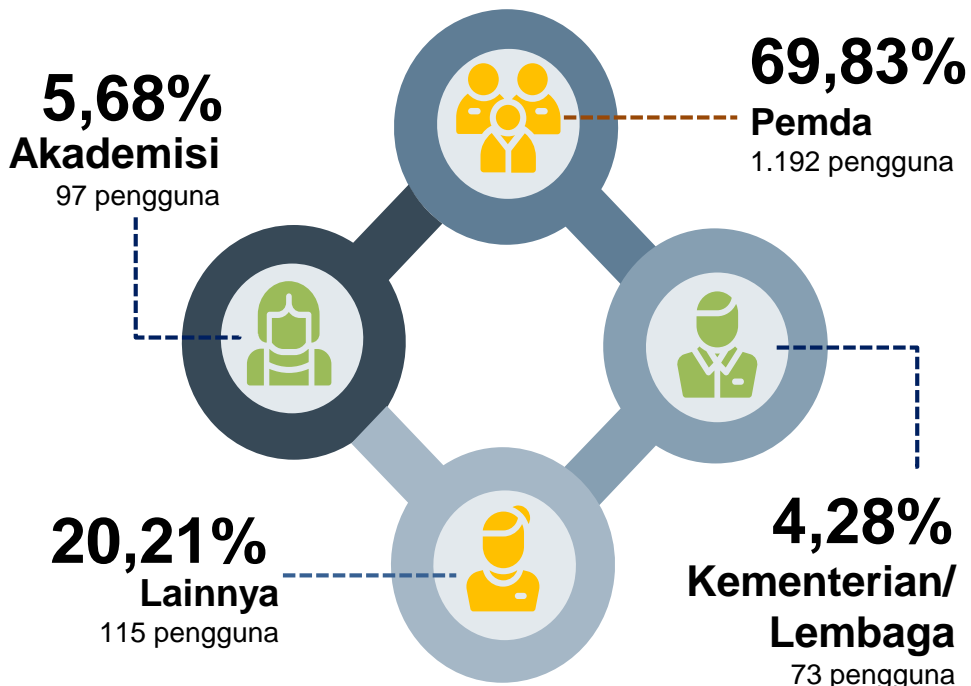
Keluhan

1

Selama bulan Juli 2023 tidak terdapat keluhan yang disampaikan baik dari pemda, akademisi, Kementerian/Lembaga dan lainnya

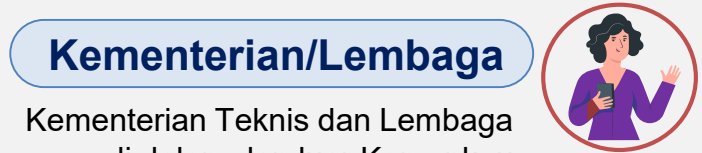


Pengguna Layanan



Pemerintah Daerah

Termasuk Anggota/ Pimpinan DPRD dan Perangkat Daerah/Desa



Kementerian/Lembaga

Kementerian Teknis dan Lembaga di dalam dan luar Kemenkeu



Akademisi

Mahasiswa dan siswa sekolah

Lainnya

Masyarakat, Pendamping Desa, Wartawan/ Media, Swasta, dan Pengguna Tanpa Identitas





Pemda Pengguna Terbanyak

Kab. Padang Lawas

(Reservasi, Surat Masuk,
Transfer, Dandes, JF AKPD)

15

Kab. Probolinggo

(SHSR, DAU, Surat Masuk,
DAK Fisik)

11

Kab. Mojokerto

(DAU, PDRD, DAK Non
Fisik, JF AKPD, Dandes)

11



14

Prov. Jambi

(PDRD, DID, DBH, JF
AKPD)

14

Prov. Kalimantan Timur

(DBH dan PDRD)

12

Prov. Gorontalo

(DAU dan JFAKPD)



Rincian Tiket Konsultasi

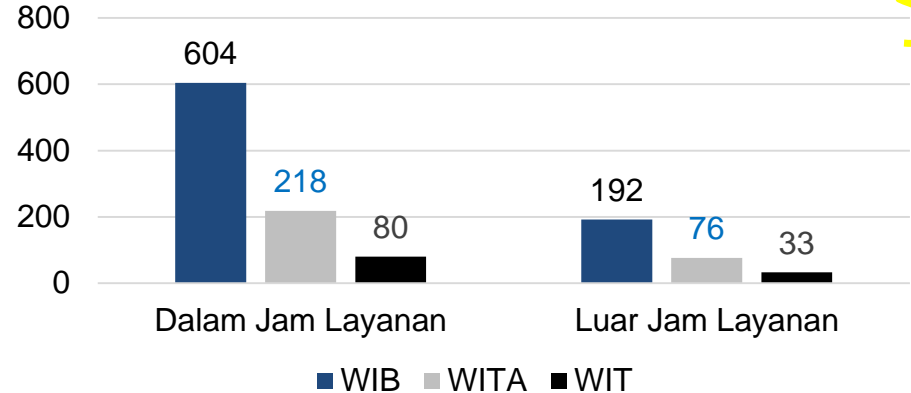
Selama bulan Juli, dari total **1.707** tiket layanan, sebanyak **1.203** tiket dapat diidentifikasi asal zona waktu, sedangkan **504** tiket sisanya tidak dapat diidentifikasi. Dari total tiket yang dapat diidentifikasi zona waktunya, **902** pengguna layanan yang menghubungi DJPK di dalam jam layanan, sedangkan **301** sisanya menghubungi DJPK di luar jam layanan yang terdiri dari **192 (64%)** pengguna layanan berasal dari bagian **Barat**, **76 (25%)** pengguna layanan berasal dari bagian **Tengah**, dan **33 (11%)** pengguna layanan berasal dari bagian **Timur**.

Dari total tiket yang masuk di luar jam layanan, terdapat **46 tiket** atau **9,8% memerlukan eskalasi lebih lanjut (2,7% dari total tiket keseluruhan).**

Topik terbanyak dari tiket yang masuk di luar jam layanan adalah:

- Spam;
- Konsultasi Teknis;
- Surat Masuk;
- Lainnya; dan
- Permintaan Data

Jumlah Pemda Menghubungi di Dalam dan Luar Jam Layanan sesuai Wilayah




Persentase Eskalasi Tiket di Luar Jam Layanan



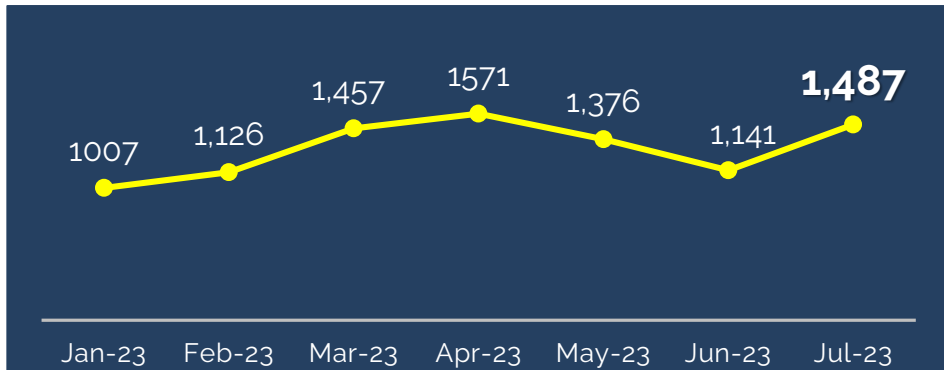


Konsultasi WhatsApp DJPK

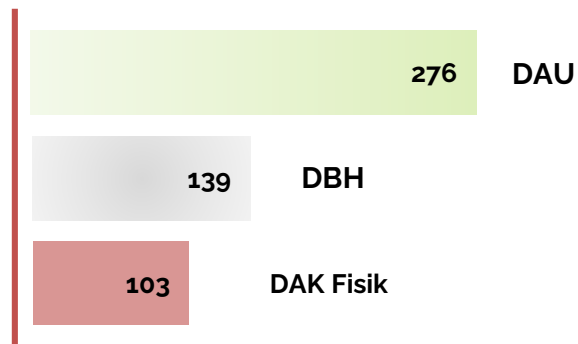
 **0811-150420-7**

Jumlah konsultasi pada bulan Juli 2023 melalui WhatsApp Contact Center DJPK **naik sebesar 30%** dibandingkan bulan sebelumnya.

Jumlah Pengguna WhatsApp Januari s.d Juli 2023



Top 3 Topik Teknis melalui WhatsApp



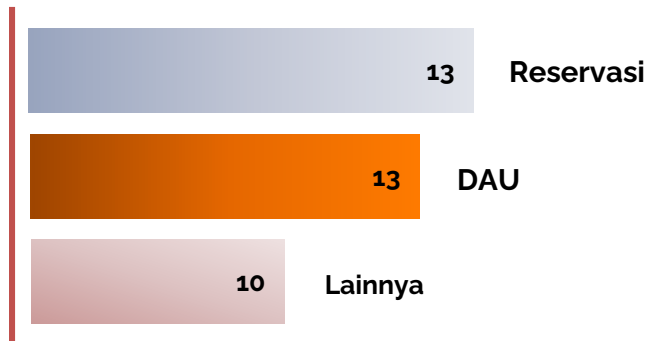
WhatsApp selalu menjadi media konsultasi yang **paling diminati** oleh pengguna layanan informasi DJPK. Layanan yang diberikan melalui WhatsApp meliputi konsultasi/pengaduan dan pesan siaran (WA Blast).



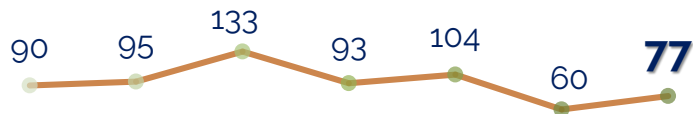
Konsultasi Telepon Dering DJPK

 **150420**

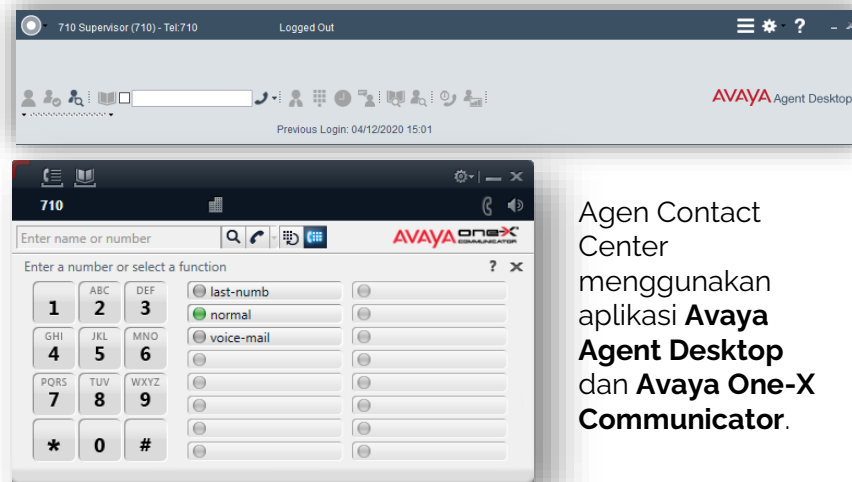
Top 3 Topik Konsultasi melalui Dering DJPK



Jumlah Pengguna Dering DJPK Januari s.d Juli 2023



Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23



Agen Contact Center menggunakan aplikasi **Avaya Agent Desktop** dan **Avaya One-X Communicator**.

Pada bulan Juli 2023, sebanyak **4,51% pengguna (77 konsultasi)** menggunakan layanan telepon sebagai media konsultasi.

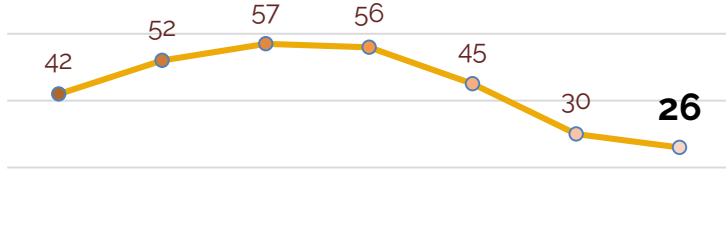


Konsultasi HAI Kemenkeu



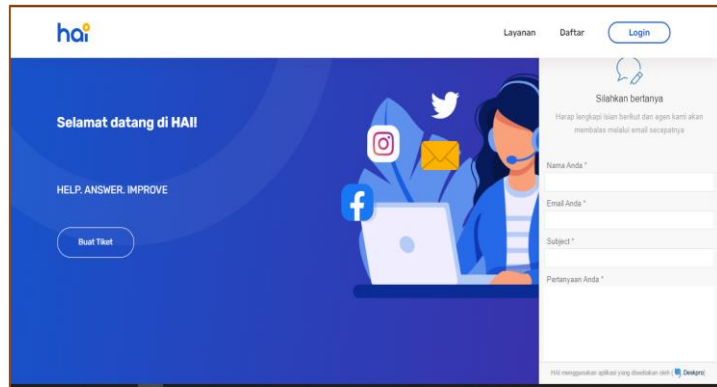
hai.kemenkeu.go.id

Jumlah Pengguna Hai Kemenkeu Januari s.d Juli 2023



Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23

Pada bulan Juli 2023, sebanyak **1,52%** (26 pengguna) menggunakan **layanan HAI Kemenkeu** sebagai layanan terintegrasi Contact Center Kemenkeu yang dapat diakses melalui situs hai.kemenkeu.go.id.



Top 2 Topik melalui Hai Kemenkeu

4

Dana Desa

4

Permintaan Data

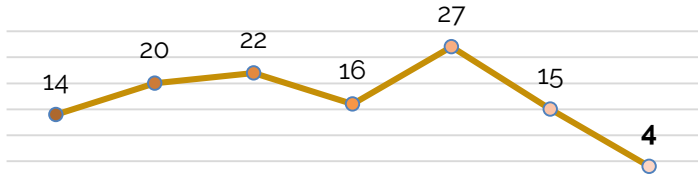


Konsultasi Live Chat



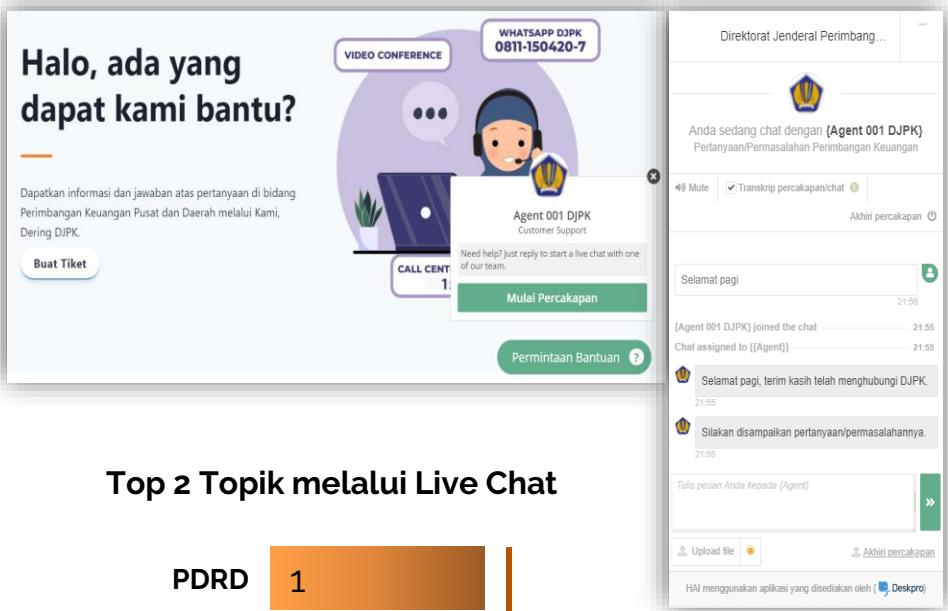
contact-djpk.kemenkeu.go.id

Jumlah Pengguna Live Chat Januari s.d Juli 2023



Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23

Pada bulan Juli 2023, sebanyak **0,2%** (4 pengguna) menggunakan **layanan Live Chat** sebagai media konsultasi



Top 2 Topik melalui Live Chat

PDRD 1

Dana Desa 1



Layanan Email



Email Call Center

callcenter.djpk@kemenkeu.go.id

Bertujuan untuk menampung:

- ✓ **Konsultasi** yang dikirim pengguna melalui Email atau Website DJPK (Hai Kemenkeu dan WebChat),
- ✓ **Pengiriman Dokumen/Surat** kepada DJPK yang bersifat tidak rutin (sewaktu-waktu)

Dikelola oleh Agen menggunakan aplikasi Deskpro yang terintegrasi dengan Layanan **Hai Kemenkeu**



Email Lapor

lapor.djpk@kemenkeu.go.id

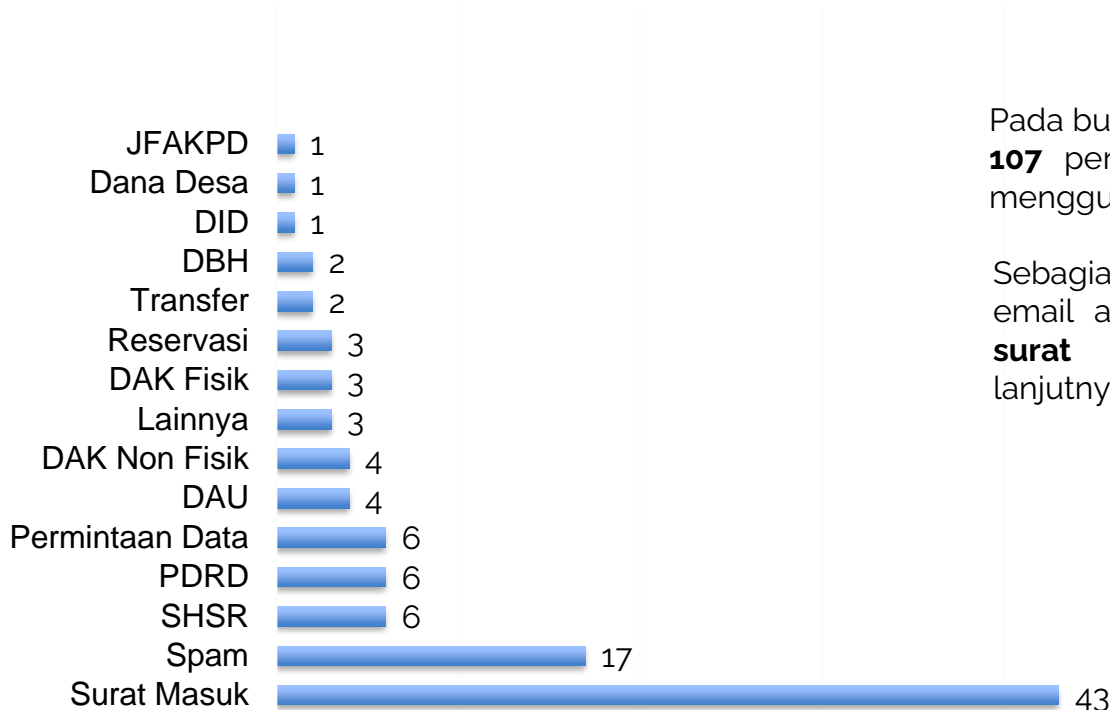
Bertujuan untuk menampung **pengiriman dokumen/surat kepada DJPK yang bersifat rutin** (setiap periode) seperti Laporan Syarat Penyaluran DAU, DAK Non Fisik, DBH, APBD, dan lain sebagainya.

Dikelola oleh Agen bersama PIC masing-masing unit terkait secara manual.





Konsultasi Email Call Center



Pada bulan Juli 2023 sebanyak **6,27%** atau **107** pengguna layanan informasi DJPK menggunakan **Layanan Email**.

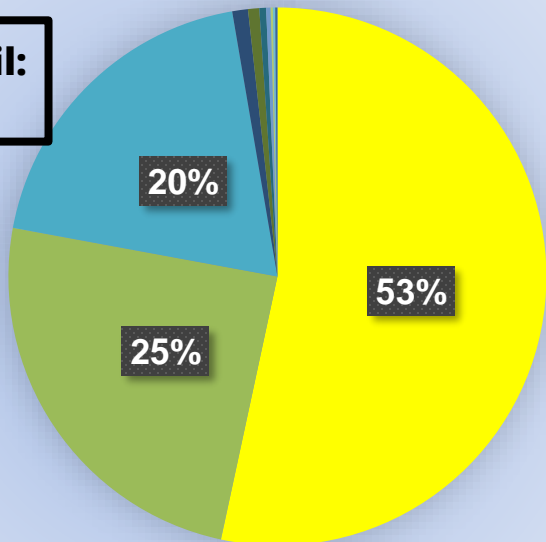
Sebagian besar keperluan melalui email adalah untuk **penyampaian surat** dan konfirmasi tindak lanjutnya, serta konsultasi.





Email Lapor DJPK

**Total Email:
742**



Dokumen yang paling banyak disampaikan:

53%

Laporan Syarat Salur DAU
(396 email)

25%

DBH
(182 email)

20%

Data THR dan Gaji Ke-13
(144 email)

1%

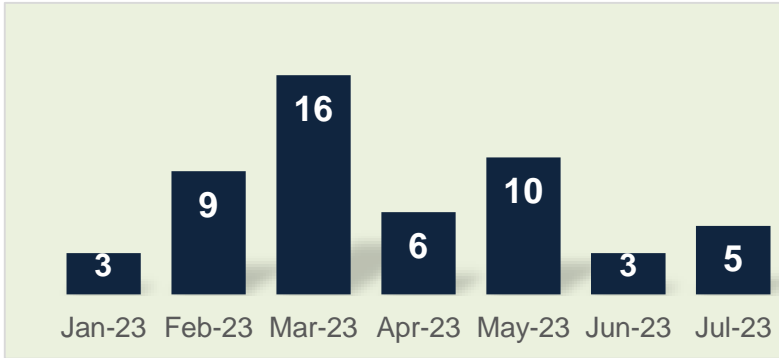
DAK Non Fisik
(7 email)

Total email yang masuk melalui email Lapor DJPK selama bulan Juli 2023 **menurun 11%** dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebanyak 835 email.



Layanan Video Conference

Grafik Jumlah Video Conference Januari s.d Juli 2023



Selama bulan Juli 2023, dilaksanakan 5x Layanan Konsultasi Pemda melalui Video Conference dengan Aplikasi MS Teams.

Tanggal	Pengguna Layanan	Topik
4 Juli 2023	Kota Kendari	Insentif Fiskal
10 Juli 2023	Kota Surakarta	PDRD
20 Juli 2023	Kab. Dairi	DAU
21 Juli 2023	Kab. Mojokerto	Insentif Fiskal
28 Juli 2023	Kab. Banjar	Dana Desa

The screenshot shows a presentation slide titled "HASIL PENGHITUNGAN ALOKASI DID TAHUN 2022" for the local government of Kota Kendari. The slide contains a detailed table of budget allocations across various categories and sub-categories. To the right of the slide, there is a summary table of the total allocations. The video conference interface shows participants' video feeds and names.

Pada Kapasitas Fiskal	Kategori	Kisaran
	Topik	Kota A
	Kategori Utama	
	Opini BPK atas APBD	
	Penetapan Perda APBD TA 2022	
	E.Pencapaian	A
	E.Anggaran	AKIP
	Keterbatasan PDP	Terdapat
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023		
	Masalah Kriteria Utama	
	Kategori Kinerja	
	Nilai Kinerja	
	Peringkat	
	Alokasi	
	Salinan Rinc.	
	Tata Kelola Keuangan Daerah	
	1. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	2. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	3. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	4. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	5. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	6. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	7. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	8. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	9. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	10. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	11. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	12. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	13. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	14. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	15. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	16. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	17. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	18. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	19. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	20. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	21. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	22. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	23. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	24. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	25. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	26. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	27. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	28. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	29. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	30. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	31. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	32. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	33. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	34. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	35. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	36. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	37. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	38. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	39. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	40. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	41. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	42. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	43. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	44. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	45. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	46. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	47. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	48. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	49. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	50. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	51. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	52. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	53. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	54. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	55. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	56. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	57. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	58. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	59. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	60. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	61. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	62. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	63. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	64. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	65. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	66. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	67. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	68. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	69. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	70. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	71. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	72. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	73. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	74. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	75. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	76. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	77. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	78. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	79. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	80. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	81. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	82. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	83. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	84. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	85. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	86. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	87. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	88. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	89. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	90. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	91. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	92. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	93. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	94. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	95. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	96. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	97. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	98. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	99. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	100. Sistem Informasi Keuangan Daerah	
	Totol Alokasi DID 2022	24.33

Kategori	Nilai	Posisi	Alokasi (M)
Vakum	0,5890	79 dari 93 Pemda	
PDN	0,0656	48 dari 93 Pemda	
Realisasi Belanja	0,4055	79 dari 93 Pemda	
Belanja per Fungsi	0,0280	54 dari 93 Pemda	
Inflasi	0,2185		10,45
TOTAL ALOKASI			10,45

Kategori	Nilai	Posisi	Alokasi (M)
PDN	0,1573	49 dari 93 Pemda	
Realisasi Belanja	0,5527	75 dari 93 Pemda	
Belanja per Fungsi	0,0435	46 dari 93 Pemda	
Inflasi	-	0 dari 93 Pemda	
TOTAL ALOKASI			0,00

Participants in the video conference: Dian Reskina H., Nanang Garendira T., Syarif..., Reiz..., Al..., BK..., BKA...



Pedoman Pelaksanaan Konsultasi Tatap Muka



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIBALANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-38/PK/2023 17 Maret 2023
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Mekanisme Layanan Konsultasi Melalui *Video Conference* dan Konsultasi Tatap Muka di Lingkungan DJPK

Yth. 1. Gubernur/Bupati/Wali Kota
2. Ketua DPRD
di seluruh Indonesia

Dalam rangka pengendalian belanja birokrasi dan menciptakan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi secara efisien berbasis teknologi, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami menyediakan layanan informasi berbasis teknologi dan informasi melalui *Contact Center* DJPK dan *website* DJPK guna mendukung pengelolaan dana Transfer ke Daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun penyusunan kebijakan dan/atau bahan lainnya yang diperlukan.
2. Kami juga menyediakan layanan konsultasi DJPK melalui *video conference* yang secara bertahap menggantikan layanan konsultasi tatap muka.
3. Reservasi layanan konsultasi tatap muka dimaksud dapat dilakukan dengan menyampaikan Surat Permintaan Konsultasi/Audiensi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dalam rangka memberikan petunjuk teknis pelaksanaan konsultasi dengan narasumber DJPK yang dilaksanakan baik secara daring melalui *video conference* maupun secara tatap muka/langsung di DJPK, DJPK menyampaikan surat nomor **S-38/PK/2023** yang dapat dijadikan pedoman bagi Pengguna Layanan khususnya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan konsultasi dengan DJPK.



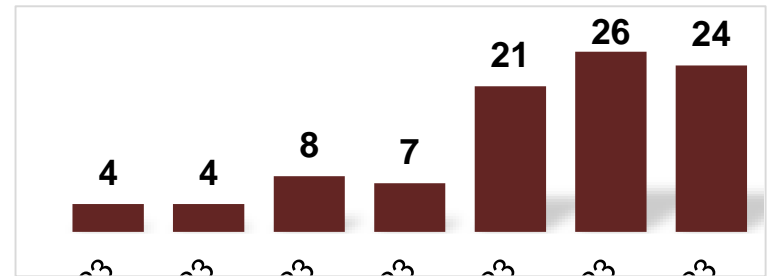
Konsultasi Tatap Muka

No	Tanggal	Pengguna Layanan	Jumlah Tamu	Topik
1	5 Juli 2023	Prov. Jambi	2	DBH
2	5 Juli 2023	Kab. Sumba Timur	2	DAU
3	6 Juli 2023	Kab. Pematang	2	DAU
4	6 Juli 2023	Kab. Teluk Wondama	2	PDRD
5	7 Juli 2023	Kab. Aceh Besar	2	Pajak Rokok
6	10 Juli 2023	Kab. Pacitan	3	DBH
7	10 Juli 2023	Kab. Humbang Hasundutan	1	Dana Desa
8	11 Juli 2023	Kab. Bolaang Mongondow	2	DAU, DAK, DID
9	11 Juli 2023	Kab. Brebes	7	DAU
10	12 Juli 2023	Kab. Halmahera Utara	4	DAU
11	13 Juli 2023	Kab. Banyuwangi	9	SHSR
12	14 Juli 2023	Kab. Pekalongan	4	DAU
13	17 Juli 2023	Prov. Bangka Belitung	2	JF AKPD
14	17 Juli 2023	Kab. Pangandaran	7	DAU
15	20 Juli 2023	Kota Bekasi	2	PDRD
16	20 Juli 2023	Kab. Aceh Utara	2	DKD, TI
17	20 Juli 2023	Prov. NTB	4	Kapfis
18	20 Juli 2023	Prov. Kalimantan Timur	10	PDRD
19	21 Juli 2023	Kab. Penajam Paser Utara	5	Hibah RR
20	24 Juli 2023	Kab. Langkat	2	Hibah
21	25 Juli 2023	Kab. Padang Lawas	7	DAU
22	26 Juli 2023	Kab. Gunung Sitoli	5	PDRD
23	28 Juli 2023	Prov. Gorontalo	9	DID
24	28 Juli 2023	Kab. Katingan	10	Dana Desa

Selama bulan Juli, telah dilaksanakan 24 kali konsultasi tatap muka dengan topik konsultasi terbanyak adalah mengenai DAU.

Namun, dalam pelaksanaannya beberapa Pemerintah Daerah **belum mematuhi** ketentuan pelaksanaan konsultasi tatap muka, seperti jumlah tamu yang hadir melebihi ketentuan, informasi yang tidak valid mengenai kehadiran Kepala Daerah, telah hadir fisik tanpa konfirmasi ataupun menyampaikan surat terlebih dahulu, dll.

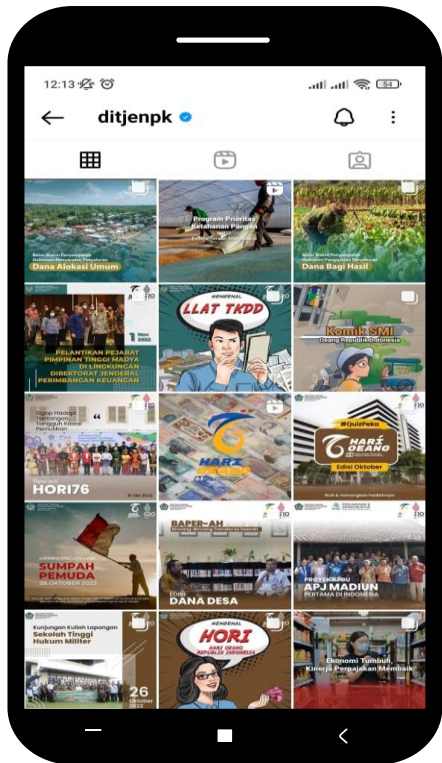
Grafik Jumlah Konsultasi Tatap Muka Januari s.d Juli 2023





Performa Instagram

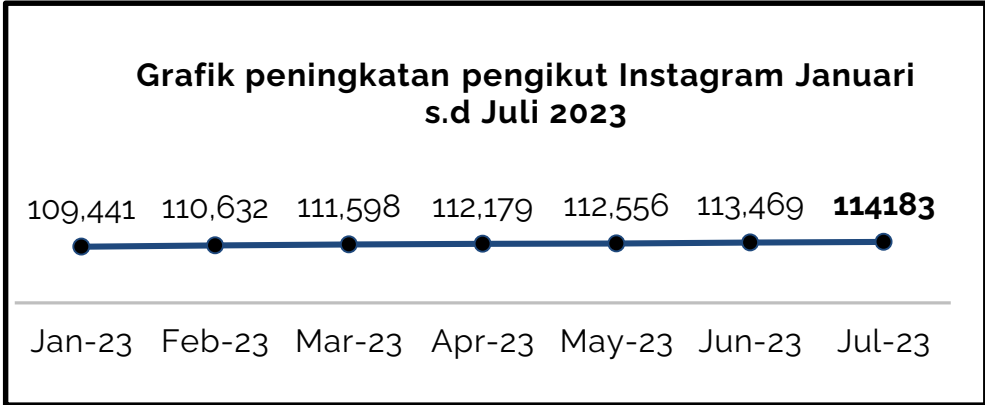
@ditjenpk



Jumlah Unggahan

28 feeds

36 story



Followers (per 31 Juli)	114.183
Reach (total)	76.631
Reach (rata-rata)	2.737

Di bulan Juli 2023, terdapat **7 akun Pemerintah Desa** yang mulai mengikuti DJPK sehingga total akun desa yang mengikuti instagram @ditjenpk sebanyak **1851 akun**. Hal ini menunjukkan bahwa media informasi DJPK semakin menjangkau lapisan pemerintahan di daerah yang semakin luas lagi.



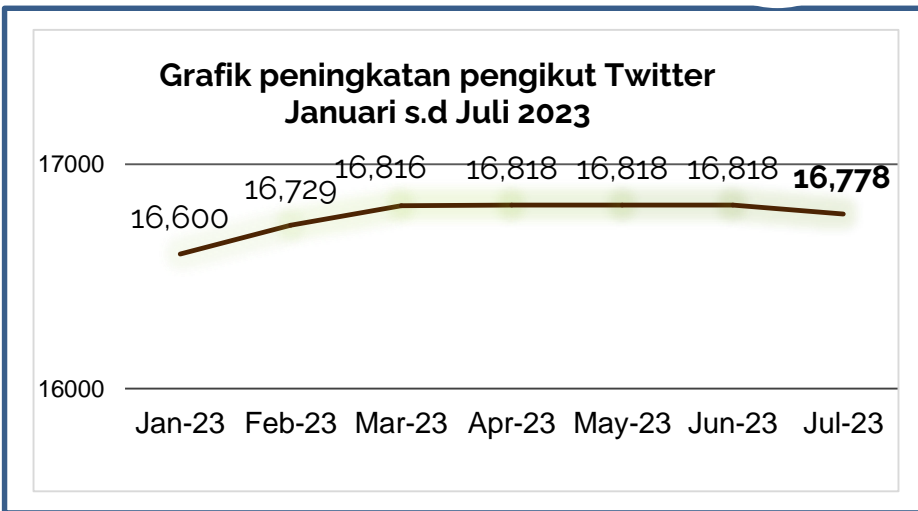
Performa Twitter

 @DitjenPK



Followers (per 31 Juli)	16.778
Profile Visits	1.115

41 konten





Performa Facebook



Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



Jumlah Unggahan

41

Followers (per 31 Juli)	13.632
Profile Visits	4.142

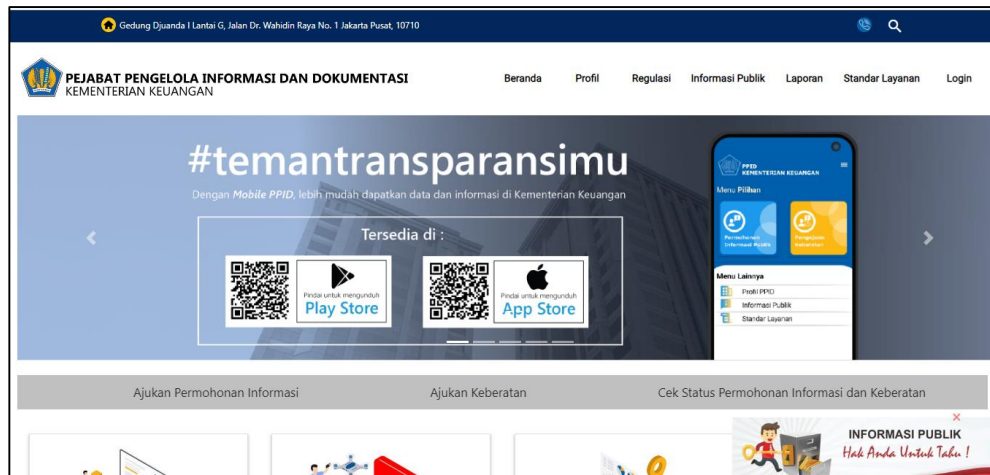
Grafik pengikut Facebook Januari s.d Juli 2023





Layanan PPID

9 permohonan



Sebagian besar permintaan data dalam rangka **keperluan penelitian. Data yang diminta** mencakup:

- Data anggaran dan realisasi **APBD**
- Data anggaran dan realisasi **Transfer ke Daerah**

Selain mempublikasikan data dan informasi melalui *website* dan media lainnya, DJPK juga melayani permohonan informasi/data melalui **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJPK.**



Kepuasan Pengguna Contact Center Dering DJPK



Nuryani



Anas



Linna



Dian



Hanna

4.90

Rata-rata nilai kepuasan
Juli 2023



Setiap agen minimal memiliki 5 penilaian dari minimal 5 pengguna yang berbeda setiap bulannya.



Survey kepuasan dihitung dari faktor **Kepuasan Layanan** dan **Substansi Jawaban** yang diberikan di setiap akhir konsultasi.



Evaluasi dan Saran

Kebijakan Konsultasi Tatap Muka

EVALUASI

Dalam pelaksanaannya, layanan konsultasi tatap muka yang dilaksanakan secara terbatas menemui beberapa kendala diantaranya ketidakpatuhan pengguna layanan terhadap jumlah tamu yang hadir, telah hadir fisik tanpa penyampaian surat terlebih dahulu, dan adanya pertimbangan khusus lainnya untuk menerima tamu yang datang langsung ke DJPK tanpa adanya penjadwalan.

SARAN

Dengan semakin meningkatnya permohonan konsultasi tatap muka dan untuk menjaga kepuasan pengguna layanan serta reputasi DJPK, **kiranya konsultasi tatap muka dapat dibuka secara luas tanpa adanya pembatasan.**



Evaluasi dan Saran

Akses Aplikasi dan Penyediaan Dashboard Penyaluran

EVALUASI

Dengan dialihkannya kewenangan penyaluran TKD kepada KPPN yang mengakibatkan terlambatnya informasi penyaluran tersaji pada aplikasi SIMTRADA, Pemda mengajukan pertanyaan mengenai rincian jenis dana yang masuk ke RKUD.

SARAN

Untuk mendukung pemberian layanan informasi, kiranya agen Contact Center diberikan akses terhadap aplikasi pelaporan existing serta diperlukan Dashboard status penyaluran yang memuat informasi rekomendasi penyaluran untuk setiap jenis TKD.



Realisasi Jumlah Pegawai

10,529



Jumlah Aktivasi

11,069



Jumlah Media Sosial

11,946

Persentase Realisasi

252.68%

dari Target Pegawai Q3 4,167

Persentase Realisasi

13.37%

dari Jumlah Seluruh Pegawai 78,754

Konten Tersedia

2,298

20.76%

Like/ Comment/ Share

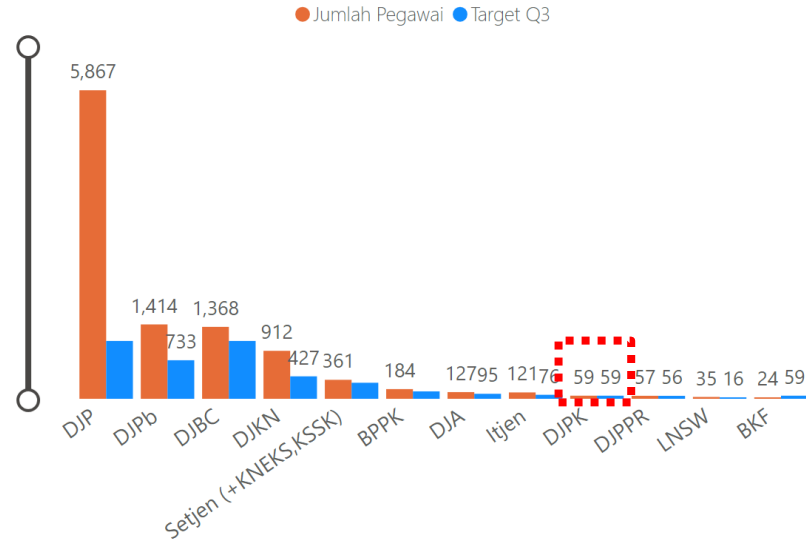
8,712

78.71%

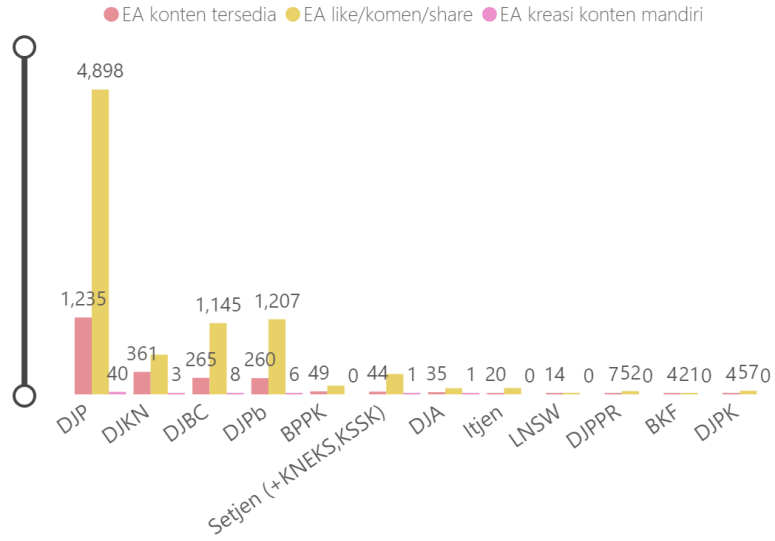
Kreasi Konten Mandiri

59

0.53%



Filter by UE1



Filter by UE1

6,942

Instagram

2,101

Twitter

1,347

Facebook

1151

WhatsApp

336

LinkedIn

49

Youtube

20

TikTok



Realisasi Jumlah Pegawai

11,939



Jumlah Aktivasi

12,578



Jumlah Media Sosial

13,512

Persentase Realisasi

286.51%

dari Target Pegawai Q3 4,167

Persentase Realisasi

15.16%

dari Jumlah Seluruh Pegawai 78,754

Konten Tersedia

2,542

20.21%

Like/ Comment/ Share

9,951

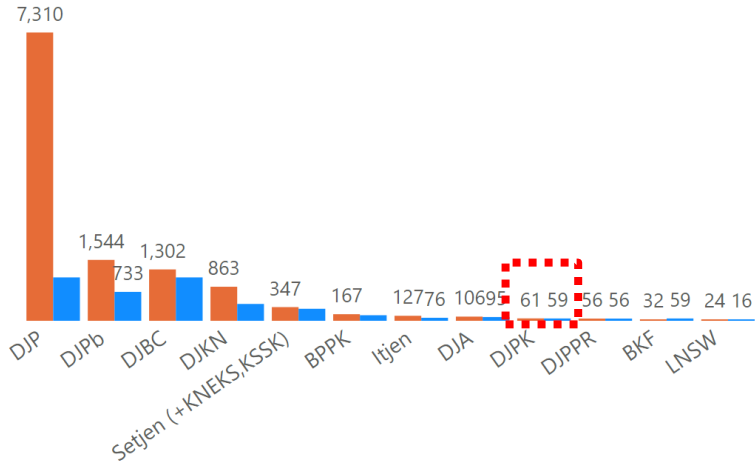
79.11%

Kreasi Konten Mandiri

85

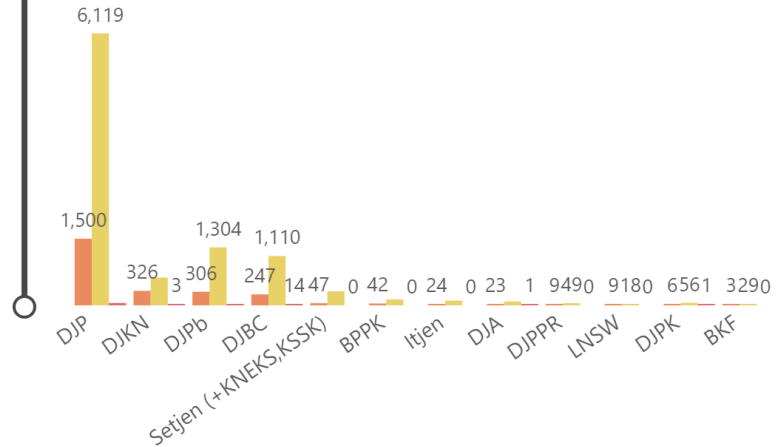
0.68%

● Jumlah Pegawai ● Target Q3



Filter by UE1

● EA konten tersedia ● EA like/komen/share ● EA kreasi konten mandiri



Filter by UE1

7,787

Instagram

2,241

Twitter

1,573

Facebook

1,444

WhatsApp

378

LinkedIn

62

Youtube

27

TikTok



Terima Kasih



Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1

Jakarta Pusat 10710

Gedung Radius Prawiro